KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA 2025

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

www.kemenpora.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
IKHTISAR EKSEKUTIF 3
BAB I 5
A. Latar Belakang 6
B. Dasar Hukum 6
C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 7
D. Kondisi SDM dan Aparatur 8
E. Potensi Permasalahan 9
F. Sistematika Pelaporan 9
BAB II 11
G. Visi dan Misi 12
H. Rencana Strategis 12
I. Perjanjian Kinerja 14
J. Pengukuran Kinerja 15
K. Rencana Aksi 17
L. Postur Anggaran 19
BAB III 21
M. Analisis Capaian Kinerja 23
N. Capaian Kinerja Lainnya 52
O. Realisasi Anggaran 56
P. Analisis Efisiensi Sumber Daya 57
BAB IV 58
A. Kesimpulan dan Saran 59

KATA PENGANTAR



DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai bagian integral dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang olahraga.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja utama, pelaksanaan program dan kegiatan strategis, serta pemanfaatan sumber daya yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas dan prestasi olahraga nasional. Seluruh capaian tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Penyusunan laporan ini berpedoman pada ketentuan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** dan **Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014**, dengan komitmen untuk menyajikan informasi kinerja yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat menjadi instrumen evaluasi kinerja yang objektif serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis di masa mendatang. Ke depan, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan guna memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan olahraga nasional.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sepanjang Tahun 2025.

Jakarta, Januari 2026

Dr. Surono, S.Pd.,M.Pd

IKHTISAR EKSEKUTIF

Keberhasilan atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan memberikan gambaran atas keberhasilan dalam pelaksanaan peningkatan prestasi olahraga, peningkatan manajemen organisasi, dan reformasi birokrasi. Secara keseluruhan keberhasilan program sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh pegawai, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan stakeholder terkait. Adapun capaian kinerja serta anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025 dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Capaian Kinerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Peningkatan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional	1.1 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional	76%	74,63%
		1.2 Jumlah Perolehan Medali pada Asian Youth Games	1 Medali	28 Medali
		1.3 Jumlah Perolehan Medali pada Asian Youth Para Games	12 Medali	89 Medali
		1.4 Jumlah Perolehan Medali pada SEA Games	276 Medali	333 medali
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	2.1 Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	72	72,29
		2.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	87,5	90,68
		2.3 Indeks Pengelolaan Aset Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	3	2,97
		2.4 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	82	88,09
		2.5 Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Layanan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	89,2	91,52
		2.6 Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	73	56,85
		2.7 Persentase Pegawai ASN yang diberikan Pengembangan Kompetensi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	33%	61,24%

Tabel 2. Serapan Anggaran TA 2025

No	Unit Kerja	Anggaran		Capaian
		Pagu (Rp)	Realisasi	
1	Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	Rp198.623.340.000	Rp196.158.328.042	98,76%
2	Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	Rp122.436.058.000	Rp122.282.238.300	99,87%
3	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	Rp93.766.777.000	Rp92.415.129.454	98,56%
4	Pembinaan Olahragawan Elit	Rp1.096.359.002.000	Rp1.094.783.386.380	99,86%
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Rp9.200.132.000	Rp8.966.691.135	97,46%
TOTAL		Rp1.520.385.309.000	Rp1.514.605.773.311	99,62%

Pada Tahun 2025, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menghadapi tantangan strategis berupa **perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Pemuda dan Olahraga pada awal tahun anggaran**. Perubahan SOTK tersebut berdampak pada penyesuaian tugas dan fungsi, pembagian peran antarunit kerja, serta penyelarasan kembali perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyesuaian organisasi tersebut memerlukan waktu dan proses adaptasi, khususnya dalam aspek perencanaan kinerja, penetapan indikator kinerja, serta koordinasi antarunit kerja di lingkungan kementerian. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan beberapa program dan kegiatan pada tahap awal tahun anggaran, termasuk dalam penyesuaian target kinerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Meskipun demikian, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tetap berupaya menjaga keberlanjutan pelaksanaan program prioritas melalui langkah-langkah penyesuaian internal agar capaian kinerja tetap sejalan dengan sasaran strategis kementerian dan mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional.

2025

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
D. Kondisi SDM dan Aparatur
E. Potensi Permasalahan
F. Sistematika Pelaporan



A. Latar Belakang

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga merupakan salah satu pilar utama dalam pengelolaan sektor olahraga nasional, bertugas untuk memastikan pengembangan dan pencapaian prestasi atlet secara berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, olahraga telah menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat identitas bangsa dan meningkatkan citra Indonesia di kancah internasional.

Akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas instansi pemerintah. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan PermenpanRB No. 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban bagi pihak yang berkepentingan serta sebagai sarana evaluasi kinerja deputi bidang peningkatan prestasi olahraga sehingga di Tahun Anggaran berikutnya capaian kinerja dapat terealisasi dengan maksimal

B. Dasar Hukum

- Undang-undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON);
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pemuda Dan Olahraga;

C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas

   Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga.

2. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:

   - perumusan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
   - koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
   - penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan prestasi olahraga;
   - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga;
   - pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
   - pelaksanaan administrasi Deputi; dan
   - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Susunan Organisasi

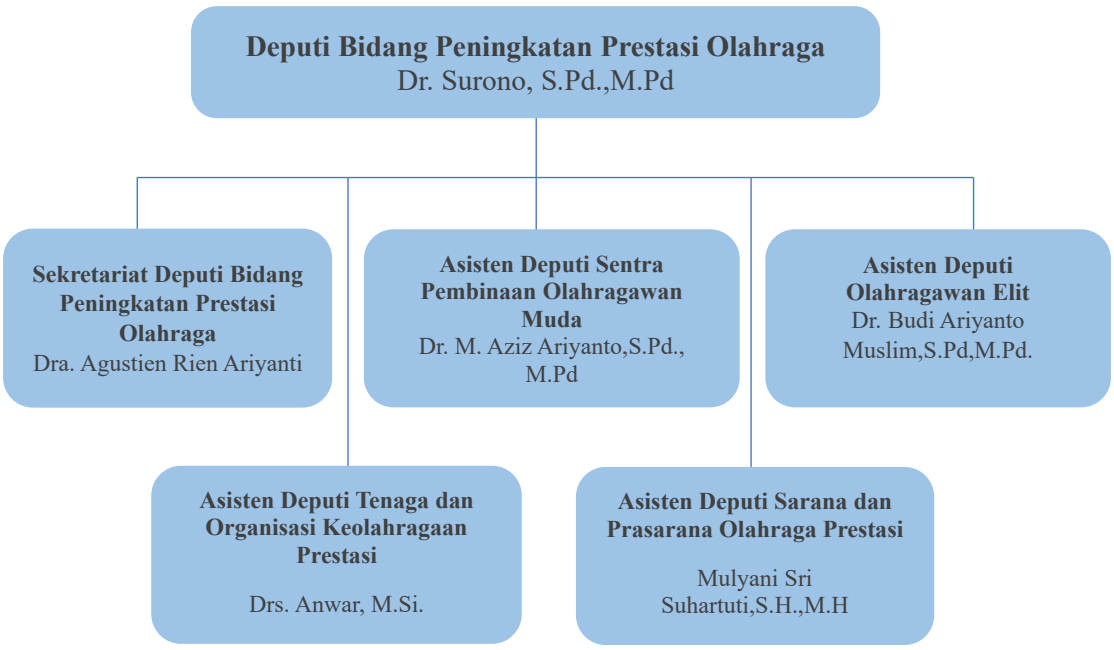

D. Kondisi SDM dan Aparatur

Pada tahun 2025, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga memiliki 596 pegawai. Komposisi SDM tersebut terdiri atas 441 PNS Olahragawan sebagai unsur utama pelaksana program pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, 96 PNS non-olahragawan yang mendukung fungsi manajerial dan administrasi, serta 59 pegawai PPPK yang memperkuat kebutuhan tenaga profesional dan teknis.

Pemetaan ini menunjukkan bahwa struktur SDM deputi didominasi oleh tenaga olahragawan, sehingga selaras dengan fokus tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian prestasi olahraga nasional.

Gambar 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

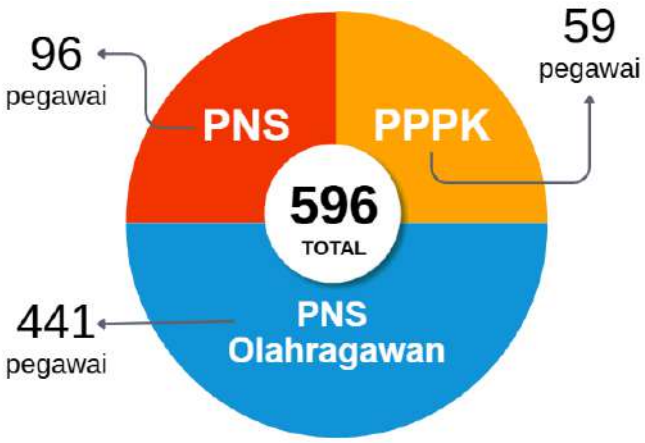

Berikut adalah jumlah pegawai yang berada di masing-masing unit kerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga:

NO	UNIT ORGANISASI	PNS	PPPK	TOTAL
1	Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	32	10	42
2	Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	20	13	33
3	Asisten Deputi Olahragawan Elit	16	21	37
5	Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi	15	9	22
4	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	13	6	21
6	Jabatan Fungsional Pelatih dan Asisten Pelatih Olahraga	84	-	84
7	PNS Olahragawan	357	-	357
TOTAL ASN		**539**	**59**	**596**

E. Potensi Permasalahan

- Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal antar lembaga maupun internal.
- Kualitas beberapa SDM masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan, sertifikasi, dan program pengembangan kinerja.
- Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya terintegrasi, serta belum terdapat keselarasan antara pengelolaan teknologi informasi dengan sistem yang sedang maupun akan dikembangkan. Selain itu, sarana dan prasarana kantor, termasuk perangkat lunak dan aplikasi, masih kurang optimal dalam mendukung kinerja
- Alokasi anggaran yang tidak konstan, dimana anggaran keolahragaan cenderung meningkat pada tahun tertentu disesuaikan dengan multi event yang dilaksanakan.
- Pada Tahun 2025, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menghadapi tantangan strategis berupa perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Pemuda dan Olahraga pada awal tahun anggaran. Perubahan SOTK tersebut berdampak pada penyesuaian tugas dan fungsi, pembagian peran antarunit kerja, serta penyelarasan kembali perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

F. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

   Menyajikan penjelasan umum terkait latar belakang, dasar hukum, tugas dan wewenang, struktur organisasi, kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, serta sistematika penyajian laporan.
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

   Menjelaskan visi misi dan rencana kerja serta anggaran serta Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tahun 2025.
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

   Menjelaskan capaian kinerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga beserta pencapaian realisasi anggarannya dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.
4. BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan atas Laporan Kinerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tahun 2025 beserta rekomendasinya untuk perbaikan di masa yang akan datang.

2025

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Visi dan Misi
B. Rencana Strategis
C. Perjanjian Kinerja
D. Pengukuran Kinerja
E. Rencana Aksi
F. Postur Anggaran



G. Visi dan Misi

Perencanaan Kinerja yang baik, tentu didasarkan kepada visi dan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun visi dan misi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga merupakan refleksi dari visi dan misi Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga merupakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

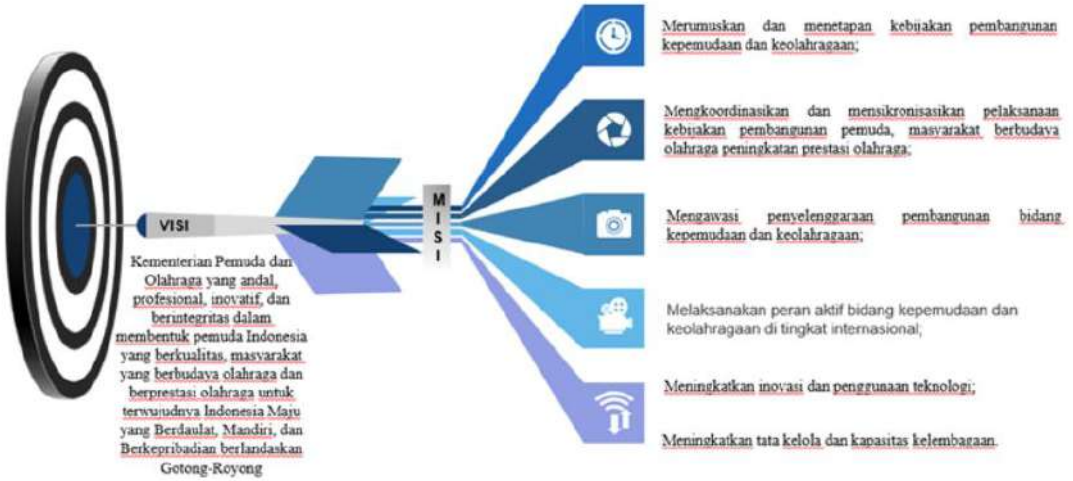

H. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman pembangunan bidang keolahragaan yang berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional secara berkelanjutan, terukur, dan berdaya saing global. Renstra ini menjadi landasan bagi seluruh unit kerja, termasuk Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran, serta program prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Dalam kerangka tersebut, Program Pencapaian Prestasi Tingkat Regional dan Internasional merupakan instrumen strategis Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk meningkatkan daya saing olahraga nasional pada ajang olahraga regional dan internasional. Program ini diarahkan untuk memastikan keberlanjutan pembinaan atlet nasional melalui pemusatan latihan nasional (Pelatnas) yang terencana, terukur, dan berbasis kinerja, sehingga mampu menghasilkan prestasi optimal dan konsisten.

Sasaran utama program ini adalah meningkatnya prestasi olahraga Indonesia yang diukur melalui persentase olahragawan Pelatnas yang berprestasi di tingkat regional dan internasional, dengan target capaian 76–80 persen pada periode 2025–2029. Indikator ini mencerminkan efektivitas sistem pembinaan prestasi, tingkat kesiapan atlet, serta dukungan sarana, prasarana, sport science, dan manajemen pembinaan yang terintegrasi.

Selain indikator kinerja utama tersebut, Program ini juga berfokus pada peningkatan capaian prestasi pada berbagai multi event olahraga internasional, meliputi Olympic Games, Paralympic Games, Asian Games, SEA Games, serta ajang olahraga usia muda dan olahraga disabilitas. Target program mencakup peningkatan jumlah perolehan medali emas, mempertahankan capaian prestasi yang telah diraih, serta memperkuat regenerasi atlet melalui keikutsertaan pada kompetisi berjenjang.

Pelaksanaan Program Pencapaian Prestasi Tingkat Regional dan Internasional didukung oleh alokasi anggaran yang meningkat secara bertahap selama periode 2025–2029 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat pembinaan prestasi olahraga nasional. Penganggaran difokuskan pada pembinaan atlet Pelatnas, persiapan dan partisipasi pada multi event internasional, serta penguatan sistem pendukung prestasi olahraga secara berkelanjutan. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan prestasi olahraga Indonesia dapat meningkat secara konsisten dan memberikan kontribusi positif terhadap citra serta daya saing bangsa di tingkat regional dan global.

No.	Indikator Kinerja Program	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
1	Persentase olahragawan Pelatnas berprestasi di tingkat regional/internasional	73,38 (2023)	76–80	76–80	76–80	76–80	76–80	Persen
2	Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games	3	N/A	N/A	N/A	5	N/A	Medali emas
3	Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games	3	N/A	N/A	N/A	5	N/A	Medali emas
4	Jumlah perolehan medali pada Asian Games	7 E / 11 P / 18 Pn (2023)	N/A	7 E / 11 P / 18 Pn	N/A	N/A	N/A	Medali
5	Jumlah perolehan medali pada Asian Para Games	29 E / 30 P / 36 Pn (2023)	N/A	29 E / 30 P / 36 Pn	N/A	N/A	N/A	Medali

6	Jumlah perolehan medali pada SEA Games	87 E / 80 P / 109 Pn (2023)	87 E / 80 P / 109 Pn	N/A	87 E / 80 P / 109 Pn	N/A	87 E / 80 P / 109 Pn	Medali
7	Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games	159 E / 148 P / 94 Pn (2023)	N/A	159 E / 148 P / 94 Pn	159 E / 148 P / 94 Pn	N/A	159 E / 148 P / 94 Pn	Medali
8	Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic Games	1 perunggu (2018)	N/A	1 emas	N/A	N/A	N/A	Medali
9	Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Games	1 E / 2 P / 2 Pn (2013)	1–2	N/A	N/A	N/A	2–3	Medali
10	Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para Games	12 E / 11 P / 14 Pn (2021)	12–15	N/A	N/A	N/A	14–16	Medali

I. Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja tahun 2025 merupakan tekad dan janji kinerja yang telah ditetapkan yang akan dicapai masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Penyusunan penetapan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi pimpinan unit kerja untuk mencapainya dalam tahun 2025.

Selama tahun berjalan terdapat perubahan pada Perjanjian Kinerja pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai berikut:

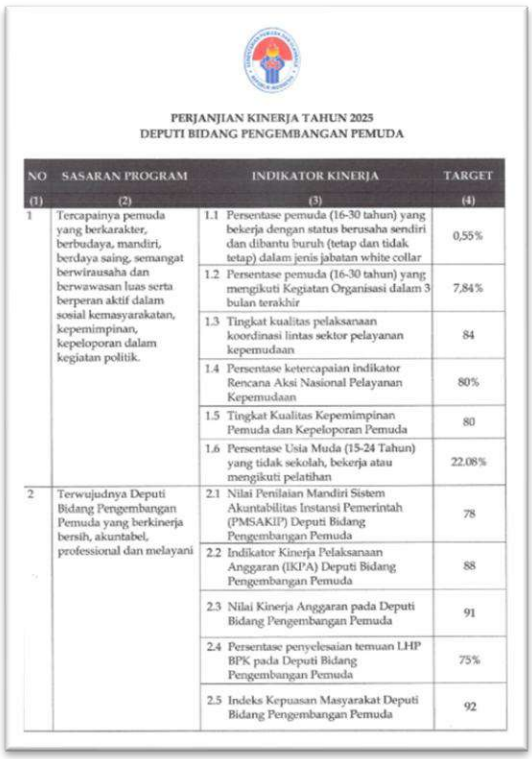

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dalam kegiatan politik.	1.1 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar	0,55%
		1.2 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti Kegiatan Organisasi dalam 3 bulan terakhir	7,84%
		1.3 Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan	84
		1.4 Persentase ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan	80%
		1.5 Tingkat Kualitas Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda	80
		1.6 Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	22.08%
2	Terwujudnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja bersih, akuntabel, professional dan melayani	2.1 Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	78
		2.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	88
		2.3 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	91
		2.4 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	75%
		2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	92

PK Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga SOTK Lama

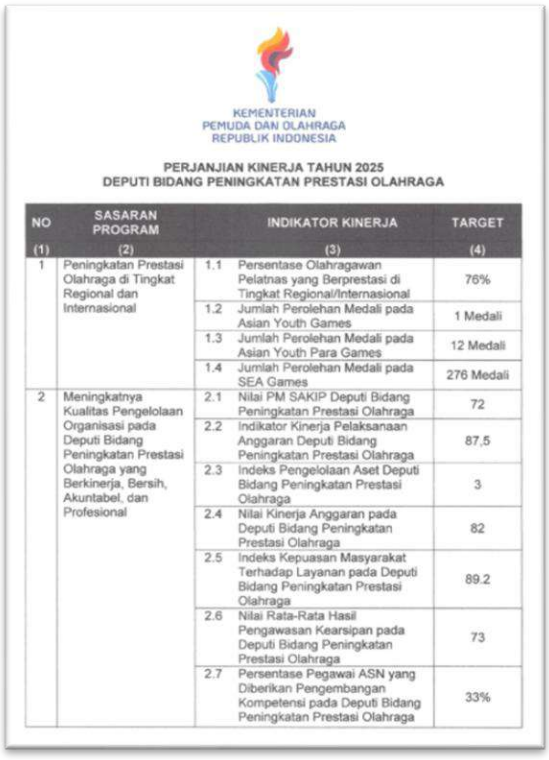

KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional	1.1 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional	76%
		1.2 Jumlah Perolehan Medali pada Asian Youth Games	1 Medali
		1.3 Jumlah Perolehan Medali pada Asian Youth Para Games	12 Medali
		1.4 Jumlah Perolehan Medali pada SEA Games	276 Medali
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang Berkinerja, Bersih, Akuntabel, dan Profesional	2.1 Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	72
		2.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	87,5
		2.3 Indeks Pengelolaan Aset Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	3
		2.4 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	82
		2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	89.2
		2.6 Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	73
		2.7 Persentase Pegawai ASN yang Diberikan Pengembangan Kompetensi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	33%

PK Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga SOTK Baru

J. Pengukuran Kinerja

<table>
<tr><th>No</th><th>Sasaran Program</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Pengukuran Kinerja</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">Peningkatan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional</td><td>1.1 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional</td><td>Persentase = Total atlet Sea Games / (Jumlah atlet IOCO + Jumlah Atlet NPC) * 100%</td></tr>
<tr><td>1.2 Jumlah Perolehan Medali pada Asian Youth Games</td><td>Jumlah Perolehan Medali = Medali Emas + Medali Perunggu + Medali Perak pada Asian Youth Games</td></tr>
<tr><td>1.3 Jumlah Perolehan Medali pada Asian Youth Para Games</td><td>Jumlah Perolehan Medali = Medali Emas + Medali Perunggu + Medali Perak pada Asian Youth Para Games</td></tr>
<tr><td>1.4 Jumlah Perolehan Medali pada SEA Games</td><td>Jumlah Perolehan Medali = Medali Emas + Medali Perunggu + Medali Perak</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga</td><td>2.1 Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga</td><td>SAKIP merupakan kepanjangan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan :
○ penetapan dan pengukuran,
○ pengumpulan data,
○ Pengklasikasian,
○ pengikhtisaran, dan
○ pelaporan kinerja pada instansi pemerintah
dalam rangka untuk mengetahui kualitas pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Kementerian Pemuda dan Olahraga

Nilai PMSAKIP = Σ $Bobot_{ij}$
Σ $Bobot_{ij}$: Bobot pada komponen ke-i dan sub-komponen ke-j
i : Komponen
j : Sub-Komponen</td></tr>
</table>

		2.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	IKPA = $\sum_{i=1}^{7} (Nilai\ Indikator_i\ x\ Bobot_i) - Pengurang\ Dispensasi\ SPM$
		2.3 Indeks Pengelolaan Aset Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	IPA Satuan Kerja = Σ (Parameter 1 + 2 + 3+ 4) Parameter: 1. Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang -undangan; 3. Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif; 4. Administrasi BMN yang Andal.
		2.4 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Nilai Kinerja Anggaran = NK Perencanaan Anggaran + NK Pelaksanaan Anggaran.
		2.5 Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Layanan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Indiktor Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga menggambarkan persepsi kepuasan pemangku kepentingan/pengguna layanan/masyarakat terhadap layanan pada unit penyelenggara pelayanan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Indikator ini diukur berdasarkan komposit dari sembilan (9) unsur Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nilai survei kepuasan masyarakat = $\sum_{i=1}^{9} xi$ x b
		2.6 Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Hasil pengawasan kearsipan = (12,5% x Nilai Aspek Penciptaan) + (12,5% x Nilai Aspek Pemeliharaan) + (12,5% x Nilai Aspek Penggunaan) + (12,5% x Nilai Aspek Penyusutan) + (25% x Nilai Aspek Sumber Daya Kearsipan) + (25% x Nilai Aspek Sarana Prasarana)

		2.7 Persentase Pegawai ASN yang diberikan Pengembangan Kompetensi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	$\frac{\text{Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pelatihan/bimtek}}{\text{Seluruh pegawai pada kedeputian}} x100\%$

K. Rencana Aksi

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Rencana Aksi yang Telah Direalisasikan	Hasil / Output 2025	Penanggung jawab
1.1	Persentase olahragawan Pelatnas berprestasi di tingkat regional/internasional	76%	- Pelaksanaan Pelatnas terpusat dan desentralisasi sesuai DBON - Monitoring dan evaluasi performa atlet secara periodik - Pendampingan sport science, sport medicine, dan psikologi olahraga	Persentase atlet Pelatnas berprestasi mencapai ≥76%	Asdep Olahragawan Elit
1.2	Jumlah perolehan medali Asian Youth Games	1 Medali	- Seleksi dan pembinaan atlet usia muda potensial - Pelaksanaan try out dan uji tanding internasional - Pelatihan intensif menjelang kejuaraan	1 medali Asian Youth Games	Asdep Olahragawan Elit
1.3	Jumlah perolehan medali Asian Youth Para Games	12 Medali	- Pembinaan atlet muda disabilitas melalui pelatnas khusus - Fasilitasi pendamping teknis dan klasifikasi atlet - Partisipasi pada kejuaraan internasional	12 medali Asian Youth Para Games	Asdep Olahragawan Elit
1.4	Jumlah perolehan medali SEA Games	276 Medali	- Penetapan cabang olahraga prioritas SEA Games - Pemusatan latihan nasional bertahap dan terukur - Pendampingan pelatih, tim medis, dan analis performa - Pelatihan pelatih, wasit, dan pelatih fisik	276 medali SEA Games	Asdep Olahragawan Elit

2.1	Nilai PM SAKIP Deputi	72	- Penyelarasan IKU, PK, dan Renja Deputi - Monitoring dan evaluasi kinerja secara triwulanan - Penyusunan laporan kinerja tepat waktu	Nilai PM SAKIP Deputi tercapai	Seluruh Unit pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
2.2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	87,5	- Penyusunan perencanaan anggaran berbasis output - Pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala - Monitoring realisasi anggaran bulanan	Nilai IKPA tercapai	Seluruh Unit pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
2.3	Indeks Pengelolaan Aset	3	- Inventarisasi dan penertiban BMN - Pemutakhiran data aset - Rekonsiliasi aset secara berkala	Indeks Pengelolaan Aset tercapai	Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
2.4	Nilai Kinerja Anggaran	82	- Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran- Evaluasi kinerja anggaran secara periodik - Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi	Nilai Kinerja Anggaran tercapai	Seluruh Unit pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
2.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,2	- Peningkatan standar layanan publik Deputi - Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat- Tindak lanjut hasil survei	Nilai IKM tercapai	Seluruh Unit pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
2.6	Nilai Rata-rata Hasil Pengawasan Kearsipan	73	- Penataan arsip aktif dan inaktif - Pembinaan pengelola arsip unit kerja	Nilai pengawasan kearsipan tercapai	Seluruh Unit pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
2.7	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	33%	- Pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial ASN - Fasilitasi sertifikasi SDM keolahragaan - Coaching dan mentoring internal	≥33% ASN mengikuti pengembangan kompetensi	Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

L. Postur Anggaran

Postur anggaran pada **Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga** diarahkan untuk mendukung pencapaian prestasi olahraga nasional melalui pembiayaan program strategis yang mencakup pembinaan atlet, pelaksanaan pemusatan latihan nasional (Pelatnas), peningkatan kualitas pelatih dan tenaga pendukung, fasilitasi bantuan sarana dan prasarana olahraga, serta dukungan manajemen dan tata kelola program peningkatan prestasi. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk mendukung keikutsertaan atlet dan tim nasional dalam kejuaraan regional dan internasional. Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dengan penyesuaian alokasi dilakukan secara selektif untuk menjawab dinamika kebutuhan pembinaan prestasi tanpa mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

PAGU ANGGARAN AWAL TAHUN ANGGARAN 2025

No	Unit Teknis	Pagu Anggaran
1	Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestais Olahraga	Rp12.000.000.000
2	Asdep Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	Rp365.197.887.000
3	Asdep Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	Rp244.273.815.000
4	Asdep Olahragawan Elit	Rp923.916.754.000
5	Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	Rp52.200.000.000
TOTAL		**Rp1.597.588.456.000**

Pada pelaksanaan sepanjang tahun 2025, terdapat beberapa kali revisi dan penyesuaian anggaran diantaranya revisi perubahan SOTK Kementerian Pemuda dan Olahraga, revisi buka blokir, dan revisi internal mengikuti dengan kondisi, kebutuhan, dan

perubahan pola pelaksanaan kegiatan di Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Berikut adalah rincian pagu anggaran final:

No	Unit Teknis	Pagu Anggaran
1	Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestais Olahraga	Rp9.200.132.000
2	Asdep Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	Rp122.436.058.000
3	Asdep Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	Rp198.623.340.000
4	Asdep Olahragawan Elit	Rp1.096.359.002.000
5	Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	Rp93.766.777.000
TOTAL		**Rp1.520.385.309.000**

2025

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Analisis Capaian Kinerja
B. Capaian Kinerja Lainnya
C. Realisasi Anggaran
D. Analisis Efisiensi Sumber Daya



Akuntabilitas kinerja merupakan kunci good governance untuk memastikan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga bertanggung jawab atas pencapaian target dan hasil kerja, serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Konsep ini melibatkan pelaporan, pengawasan, dan evaluasi kinerja yang transparan.

Dalam upaya mencapai dua sasaran program dan sembilan indikator kinerja, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah merancang suatu kerangka kerja yang berorientasi pada hasil.

Dengan menerapkan prinsip SMART, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga memastikan bahwa setiap tujuan yang ditetapkan dapat diukur, dicapai dalam waktu yang ditentukan, serta berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, sesuai dengan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja sebagai berikut:

Kategori	Nilai	Interpretasi
AA	90 - 100	Sangat memuaskan,Telah terwujudnya Good Governance. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	80 - 90	Memuaskan,Memimpin perubahan, kinerja tinggi, dan sangat akuntabel
BB	70 - 80	Sangat Baik, AKIP baik pada 2 atau 3 unit kerja. Akuntabilitas sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
B	60 - 70	Baik,AKIP baik pada 1 atau 3 unit kerja, perlu adanya perbaikan pada unit kerja.
CC	50 - 60	Cukup (memadai)Perlu banyak perbaikan meskipun AKIP cukup baik.
C	30 -50	Kurang,Sistem dan tatanan AKIP kurang dapat diandalkan, perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0 - 30	Sangat kurang,Sistem dan tatanan AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan.

M. Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3. Capaian Kinerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional	1.1 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional	76%	74,63%	98%
		1.2 Jumlah Perolehan Medali pada Asian Youth Games	1 Medali	28 Medali	120%
		1.3 Jumlah Perolehan Medali pada Asian Youth Para Games	12 Medali	89 Medali	120%
		1.4 Jumlah Perolehan Medali pada SEA Games	276 Medali	333 medali	120%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	2.1 Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	72	72,29	100%
		2.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	87,5	90,68	104%
		2.3 Indeks Pengelolaan Aset Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	3	2,97	99%
		2.4 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	82	88,09	107%
		2.5 Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Layanan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	89,2	91,52	112%
		2.6 Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	73	56,85	78%
		2.7 Persentase Pegawai ASN yang diberikan Pengembangan Kompetensi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	33%	61,24%	120%
NILAI TOTAL					**107%**

Analisa pada capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional

   1.1 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional /Internasional

   Indikator kinerja *Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional* digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pembinaan atlet nasional melalui program Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) dalam menghasilkan prestasi olahraga pada ajang regional dan internasional. Indikator ini mencerminkan kualitas proses pembinaan, kesiapan atlet, serta dukungan sarana, prasarana, dan tenaga pendukung yang diberikan selama pelaksanaan Pelatnas.

   Perhitungan indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah olahragawan Pelatnas yang berhasil meraih prestasi (medali atau peringkat tertentu sesuai kriteria) pada kejuaraan tingkat regional dan/atau internasional terhadap total jumlah olahragawan yang mengikuti Pelatnas pada tahun berjalan, kemudian dikalikan 100 persen.

   Pada tahun 2025, *Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional dan Internasional* mencapai **74,63%**, yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah atlet Pelatnas yang meraih prestasi sebanyak **750 orang** terhadap total atlet Pelatnas yang mengikuti Pelatnas dari unsur **IOCO dan NPC sebanyak 1.005 orang**.

   Capaian tersebut **belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 76%**, sehingga terdapat selisih sebesar **1,37 poin persentase** dari target. Ketidaktercapaian target ini antara lain dipengaruhi oleh belum meratanya capaian prestasi di seluruh cabang olahraga serta adanya variasi tingkat kesiapan atlet dalam menghadapi kompetisi regional dan internasional.

   Belum tercapainya target indikator kinerja *Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional dan Internasional* pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa kendala. Kendala utama antara lain belum meratanya capaian prestasi di seluruh cabang olahraga, perbedaan tingkat kesiapan atlet dalam menghadapi

kompetisi, serta keterbatasan waktu adaptasi sebagian atlet terhadap program Pelatnas. Selain itu, faktor cedera, jadwal kompetisi yang padat, serta dinamika regenerasi atlet turut memengaruhi konsistensi pencapaian prestasi.

Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan penguatan perencanaan pembinaan yang lebih berbasis data dan kebutuhan cabang olahraga, peningkatan pemanfaatan sport science dalam pemantauan performa dan pencegahan cedera, serta optimalisasi periodisasi latihan agar lebih selaras dengan kalender kompetisi. Selain itu, koordinasi dengan induk cabang olahraga akan terus ditingkatkan guna memastikan kesinambungan pembinaan, kesiapan atlet, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program Pelatnas secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, capaian indikator ini tetap menunjukkan bahwa mayoritas atlet Pelatnas mampu berprestasi pada level regional dan internasional. Ke depan, diperlukan penguatan strategi pembinaan yang lebih terfokus, optimalisasi pemanfaatan sport science, serta peningkatan kesinambungan program Pelatnas guna mendorong peningkatan capaian indikator kinerja pada periode selanjutnya.

1.2 Jumlah Perolehan Medali pada Asian Youth Games

Indikator kinerja *Jumlah Perolehan Medali pada Asian Youth Games* digunakan untuk mengukur keberhasilan pembinaan atlet usia muda melalui program Pelatnas dalam menghasilkan prestasi pada ajang multi-event internasional tingkat Asia. Indikator ini mencerminkan efektivitas pembinaan atlet muda sebagai bagian dari upaya regenerasi atlet nasional.

Pada tahun 2025, target indikator ini ditetapkan sebesar **1 medali**. Berdasarkan hasil pelaksanaan Asian Youth Games, atlet Indonesia berhasil meraih total **28 medali**, terdiri atas **4 medali emas, 6 medali perak, dan 18 medali perunggu**.

Dengan demikian, realisasi indikator kinerja mencapai **28 medali**, sehingga indikator ini **melampaui target secara signifikan**. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan atlet usia muda melalui Pelatnas berjalan dengan sangat baik dan mampu menghasilkan prestasi yang melampaui ekspektasi kinerja.

Tingginya perolehan medali ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pada aspek kuantitas, tetapi juga kualitas prestasi, yang ditunjukkan dengan diraihnya medali emas pada ajang kompetisi tingkat Asia. Capaian ini didukung oleh seleksi atlet yang tepat, program latihan yang terencana dan berkelanjutan, dukungan pelatih dan tenaga pendukung yang kompeten, serta optimalisasi keikutsertaan atlet dalam kejuaraan internasional sebagai ajang peningkatan pengalaman bertanding.



Grafik 1. Tren Medali Indonesia pada Asian Youth Games

Grafik Tren Medali Indonesia pada Asian Youth Games menunjukkan adanya peningkatan kinerja prestasi olahraga pemuda Indonesia yang signifikan. Pada pelaksanaan Asian Youth Games tahun 2013, Indonesia berhasil meraih total **5 medali**. Sementara itu, pada Asian Youth Games tahun 2025, perolehan medali meningkat secara signifikan menjadi **28 medali**.

Kenaikan jumlah medali tersebut mencerminkan adanya **kemajuan dalam sistem pembinaan atlet usia muda**, yang didukung oleh peningkatan kualitas pelatihan, penguatan sentra pembinaan, serta optimalisasi persiapan atlet menuju kejuaraan internasional. Selain itu, peningkatan ini juga menunjukkan semakin efektifnya sinergi antara pemerintah, federasi cabang olahraga, dan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional.

Secara keseluruhan, tren peningkatan perolehan medali Indonesia pada Asian Youth Games menjadi indikator positif atas **keberhasilan program peningkatan prestasi**

olahraga pemuda, sekaligus menjadi modal penting dalam menyiapkan atlet-atlet potensial menuju ajang olahraga tingkat Asia dan internasional di masa mendatang.



1.3 Jumlah Perolehan Medali pada Asian Youth Para Games

Kontingen Indonesia menunjukkan performa yang sangat membanggakan pada ajang Asian Youth Para Games 2025 yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) dan berakhir pada pertengahan Desember 2025. Dalam ajang olahraga multi-event tingkat Asia bagi atlet muda penyandang disabilitas ini, Indonesia berhasil melampaui target awal perolehan medali yang ditetapkan, sekaligus mencatatkan capaian prestasi yang signifikan.

Dengan mengirimkan 56 atlet muda yang bertanding di 8 cabang olahraga, Indonesia mampu mengamankan peringkat ke-6 secara keseluruhan dengan perolehan **32 medali emas, 33 medali perak, dan 25 medali perunggu.** Capaian ini jauh melampaui target awal kontingen Indonesia yang hanya menargetkan 12 medali, sehingga mencerminkan peningkatan kualitas pembinaan atlet difabel muda secara signifikan.

Cabang olahraga para-renang menjadi penyumbang medali terbesar dengan total 26 medali, disusul oleh para-atletik, para-bulu tangkis, dan boccia. Prestasi individu juga menjadi sorotan, di antaranya atlet renang muda Abdil Majid Rahman yang tampil gemilang dengan meraih 4 medali emas dan 2 medali perak, serta berhasil memenuhi

standar kualifikasi kejuaraan dunia. Selain itu, atlet Delima Yunia Susanti mencatatkan prestasi bersejarah dengan memecahkan rekor Asia pada cabang para-angkat berat kelas -79 kg putri melalui angkatan seberat 88 kg.

Kontingen Indonesia diberangkatkan dari Solo dengan target yang relatif rendah, namun hasil akhir kompetisi menunjukkan adanya lonjakan kualitas, daya saing, dan kesiapan atlet muda pada kelompok usia 14–20 tahun. Prestasi yang diraih tidak hanya mencerminkan keberhasilan pada ajang kompetisi, tetapi juga menjadi indikator kuat efektivitas program pembinaan atlet difabel usia muda.

Secara keseluruhan, keikutsertaan Indonesia dalam Asian Youth Para Games 2025 menjadi tonggak penting dalam pembinaan atlet difabel muda, sekaligus berfungsi sebagai ajang persiapan strategis bagi atlet untuk melangkah ke level senior dan menghadapi kejuaraan internasional yang lebih tinggi di masa mendatang.



Grafik 2. Tren Perolehan Medali Indonesia pada Asian Youth Para Games

1.4 Jumlah Perolehan Medali pada SEA Games

SEA Games merupakan ajang olahraga multievent tingkat regional Asia Tenggara yang memiliki nilai strategis dalam mengukur keberhasilan pembinaan prestasi olahraga nasional. Partisipasi Indonesia dalam ajang ini tidak hanya bertujuan untuk meraih prestasi berupa medali, tetapi juga menjadi sarana evaluasi efektivitas program pembinaan atlet, peningkatan kualitas pelatih dan tenaga pendukung, serta

kesiapan sistem manajemen olahraga nasional dalam menghadapi kompetisi internasional.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan indikator Jumlah Perolehan Medali pada SEA Games sebagai salah satu tolok ukur kinerja utama. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembinaan prestasi olahraga berorientasi pada hasil (outcome) yang terukur, sekaligus mendorong peningkatan daya saing atlet Indonesia di tingkat regional.

Target kinerja untuk indikator Jumlah Perolehan Medali pada SEA Games dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan sebanyak 276 medali. Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan capaian pada penyelenggaraan SEA Games sebelumnya, potensi cabang olahraga unggulan, serta kesiapan atlet dan pelatih yang mengikuti program pembinaan nasional.

Berdasarkan hasil pelaksanaan SEA Games, realisasi perolehan medali kontingen **Indonesia mencapai 333 medali, yang terdiri atas 91 medali emas, 112 medali perak, dan 130 medali perunggu. Dengan demikian, tingkat pencapaian kinerja mencapai 120,7% dari target yang telah ditetapkan.** Capaian ini menunjukkan bahwa target indikator tidak hanya terpenuhi, tetapi juga terlampaui secara signifikan.



Keberhasilan melampaui target perolehan medali tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan prestasi olahraga yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Optimalisasi pemusatan latihan nasional, peningkatan kualitas pelatih dan tenaga pendukung, serta pemanfaatan sport science secara lebih terintegrasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan performa atlet selama pertandingan. Selain itu, sinergi antar pemangku kepentingan, baik kementerian/lembaga, induk cabang olahraga, maupun pemangku kepentingan lainnya, turut berkontribusi terhadap pencapaian hasil yang optimal.

Capaian perolehan medali yang melampaui target juga menunjukkan adanya peningkatan konsistensi dan kedalaman prestasi atlet Indonesia di berbagai cabang olahraga. Tidak hanya pada cabang olahraga unggulan, kontribusi medali juga datang dari cabang-cabang lain yang menunjukkan perkembangan signifikan. Hal ini menandakan bahwa proses pembinaan tidak terfokus pada cabang tertentu saja, tetapi telah berjalan secara lebih merata dan sistematis.

Dari sisi manajemen kinerja, hasil ini mengindikasikan bahwa perencanaan program, penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan pembinaan telah selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Realisasi indikator ini juga menjadi bukti bahwa pendekatan berbasis kinerja (performance-based management) mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional di tingkat regional.

Secara keseluruhan, indikator Jumlah Perolehan Medali pada SEA Games menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Capaian ini menegaskan keberhasilan pelaksanaan program pembinaan prestasi olahraga nasional serta meningkatnya daya saing atlet Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kebijakan dan strategi pembinaan olahraga ke depan, sekaligus menjadi motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi pada ajang internasional berikutnya. Dengan capaian ini, indikator perolehan medali pada SEA Games dapat dinilai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis peningkatan prestasi olahraga nasional.

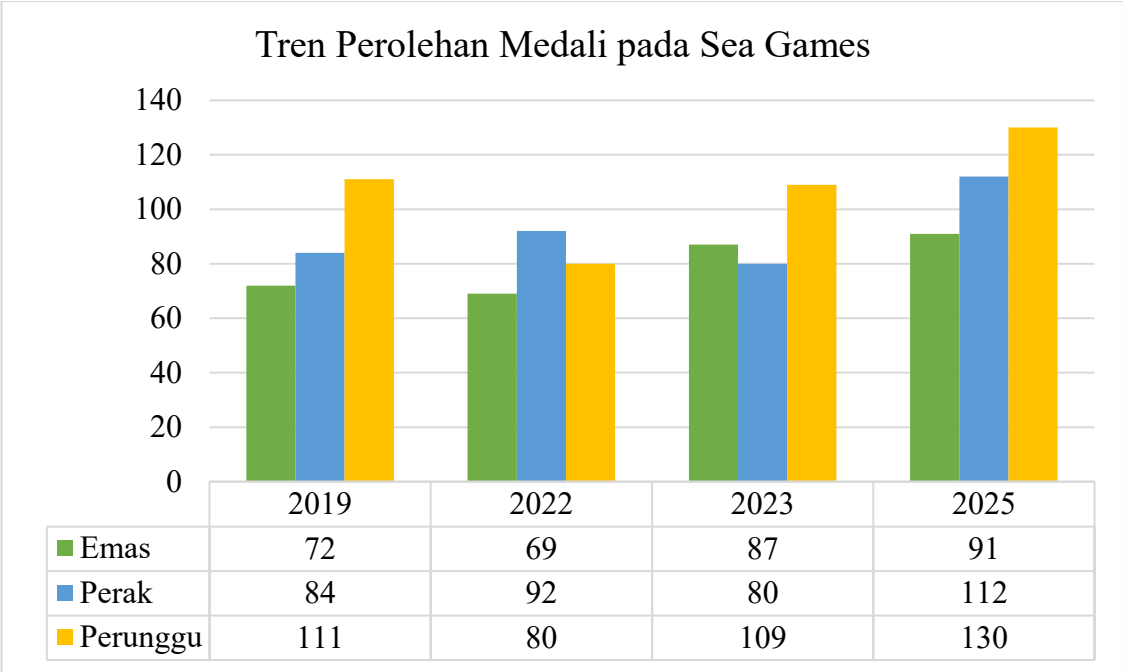

Grafik 3. Tren Perolehan Medali pada Sea Games

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

2.1 Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi dilaksanakan sebagai bagian dari Upaya penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana dimanatkan dalam Peraturan Menteri PANRB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan turunan peraturan di Kemenpora melalui Keputusan Menteri Pemuda dan

Olahraga Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2024 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tujuan Evaluasi AKIP adalah:

a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP pada unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
b. Menilai laporan kinerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
c. Meberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas pada unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Bagi seorang pimpinan, SAKIP akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan. Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Nilai yang digunakan dalam Indikator ini adalah hasil dari akumulasi komponen manajemen kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Satuan Kerja (25%) yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi Gabungan pada Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Tabel 4. Lembar Kerja Penilaian Evaluasi AKIP

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Deputi 4
1	**PERENCANAAN KINERJA**	**30.00**	
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	6.00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	6.46
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	9.45
2	**PENGUKURAN KINERJA**	**30.00**	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	6.00

2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.08
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	14.29
3	**PELAPORAN KINERJA**	**15.00**	
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.50
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	2.67
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.75
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**25.00**	
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	25.00	11.08
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**72.29**

Hasil penilaian evaluasi SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2024 oleh Inspektorat Kemenpora sebesar **72,29** (predikat “BB” dengan interpretasi “Sangat Baik”), dengan perincian hasil evaluasi sebagai berikut.

a. Belum ada penyesuaian target baik di Renstra maupun PK dengan capaian tahun sebelumnya capaian tahun 2023 lebih besar daripada tahun 2024.
   - Tahun 2023, persentase atlet junior yang menjadi atlet elite andalan nasional dengan target = 55% dan realisasi 75%.
   - Tahun 2024, persentase atlet junior yang menjadi atlet elite andalan nasional dengan target = 60% dan realisasi 65,59%.

b. Perlu melampirkan perhitungan capaian kinerja daan data perhitungan capaian kinerja dari sumbernya untuk indikator Persentase Olahragawan Elit Junior yang menjadi Potensial Olahragawan Elit Nasional.

c. Belum menyusun laporan kinerja berkala (triwulan/semester). Saat ini laporan kinerja masih disusun 1 tahun sekali sehingga mendapat bobot nilai “C” di lembar kerja evaluasi.

d. Belum menyempurnakan laporan kinerja dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan atas setiap indikator kinerja.
e. Belum semua rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti seperti pada laporan kinerja belum menginfokan seluruh indikator kinerja telah dilakukan analisis efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian kinerja.

Rekomendasi terhadap permasalahan hasil evaluasi di atas adalah sebagai berikut.

a. Memastikan setiap kinerja di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah dilengkapi indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound).*
b. Menyempurnakan kualitas pelaporan kinerja yang baik pada level unit kerja dengan kedalaman informasi yang merata (penjelasan devinisi operasional pada Laporan Kinerja) dan memadai pada setiap indikator kinerja, seperti eksplorasi analisis faktor pendorong atau penghambat dalam pencapaian kinerja, analisis program/kegiatan yang mendorong capaian kinerja, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya per indikator.
c. Memastikan informasi dalam laporan kinerja pada unit kerja dimanfaatkan dalam penentuan target kinerja pada periode berikutnya.
d. Memastikan unit kerja menindaklanjuti rekomendasi evaluasi AKIP Inspektorat Kemenpora tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, nilai evaluasi SAKIP selama empat tahun terakhir secara konsisten berada di atas target yang telah ditetapkan. Sebagaimana diketahui, target dan realisasi SAKIP yang tercantum dalam Laporan Kinerja Tahun berjalan merupakan target dan realisasi SAKIP pada tahun sebelumnya, mengingat penilaian SAKIP didasarkan pada hasil evaluasi atas penyusunan Laporan Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Inspektorat. Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan evaluasi kinerja secara berkelanjutan guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

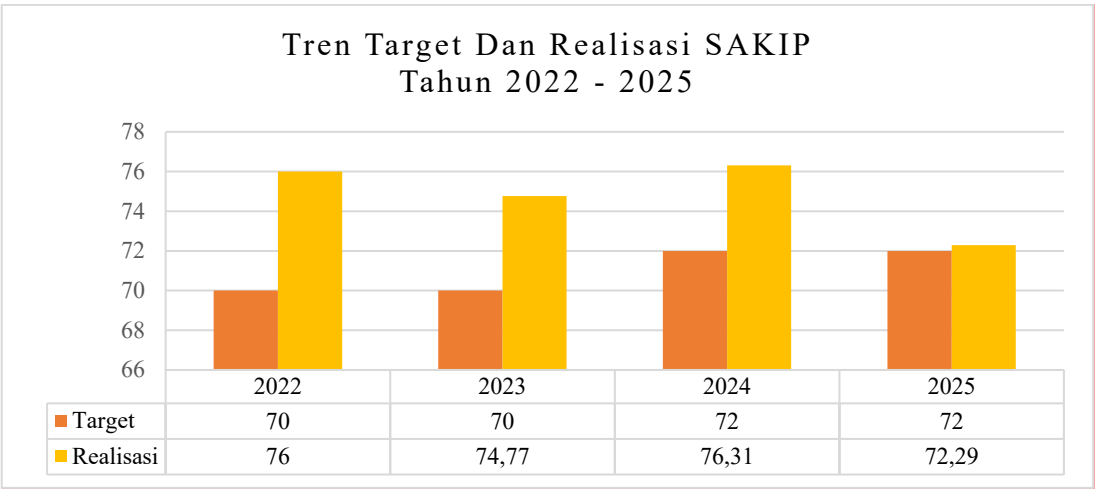

Grafik 4. Tren Target Dan Realisasi SAKIP Tahun 2022 – 2025

2.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA berfungsi sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui *Online Monitoring* (OM)-SPAN, serta merupakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan *value for money* belanja Kementerian/Lembaga, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan Kementerian/Lembaga.

IKPA merupakan salah satu indikator dalam penilaian NKA dengan bobot sebesar 50%. Nilai yang digunakan dalam IKPA adalah hasil adopsi langsung pada Aplikasi OM-SPAN atas penjumlahan/pengurangan beberapa indikator dengan bobot tertentu yaitu:

a. Revisi DIPA (10%)
b. Deviasi Halaman III DIPA (15%)
c. Penyerapan anggaran (20%)
d. Belanja Kontraktual (10%)
e. Penyelesaian Tagihan (10%)
f. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
g. Capaian Output (25%)
h. Dispensasi SPM (pengurang)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diperoleh melalui integrasi data pelaksanaan anggaran yang bersumber dari aplikasi OM SPAN. Berdasarkan hasil penghitungan pada periode Desember 2025, Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga memperoleh Nilai IKPA sebesar 90,68.

Dengan bobot sebesar 50%, kontribusi Nilai IKPA terhadap Nilai Kinerja Anggaran adalah sebesar 45,34%. Nilai ini mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang baik, termasuk ketepatan waktu realisasi anggaran, kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan, serta konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan.

Tabel 5. Nilai IKPA pada aplikasi OM-SPAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	088	092	418140	BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA KEMENPORA	Nilai	100.00	65.97	95.82	89.90	99.58	76.75	100.00	90.68	100%	0.00	90.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.90	19.16	8.99	9.96	7.68	25.00				
					Nilai Aspek	82.99		90.51				100.00				

Dengan capaian Nilai IKPA Tahun 2025 sebesar 90,68, kualitas pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menunjukkan peningkatan yang signifikan dan berada pada kategori sangat memuaskan. Capaian ini menjadi perbaikan yang positif apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2023 dan Tahun 2024, di mana realisasi Nilai IKPA belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya Nilai IKPA pada tahun-tahun sebelumnya adalah rendahnya nilai indikator deviasi Halaman III DIPA. Rendahnya nilai indikator tersebut disebabkan oleh tingginya deviasi atau selisih antara rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi anggaran yang dihitung secara triwulanan. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya kesesuaian antara perencanaan penarikan dana dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dalam rangka meningkatkan nilai IKPA, Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan RPD serta mengajukan Surat Permohonan

Penyesuaian Perhitungan Nilai IKPA kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan, khususnya untuk deviasi yang disebabkan oleh adanya penambahan anggaran yang bersumber dari BA BUN.

Ke depan, untuk mengatasi permasalahan deviasi Halaman III DIPA secara berkelanjutan, diperlukan komitmen dan sinergi seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Setiap unit kerja diharapkan menyusun rencana kegiatan secara lebih terukur pada setiap triwulan serta melakukan penyesuaian RPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada awal setiap triwulan, sehingga perencanaan dan realisasi anggaran dapat berjalan lebih selaras dan berdampak positif terhadap peningkatan Nilai IKPA pada tahun-tahun berikutnya.

Peningkatan kapasitas dan pemahaman pejabat pengelola keuangan dan kegiatan juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam menghadapi dinamika kebijakan dan penyesuaian organisasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas pelaksanaan anggaran dapat terus ditingkatkan dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pencapaian sasaran program peningkatan prestasi olahraga nasional.

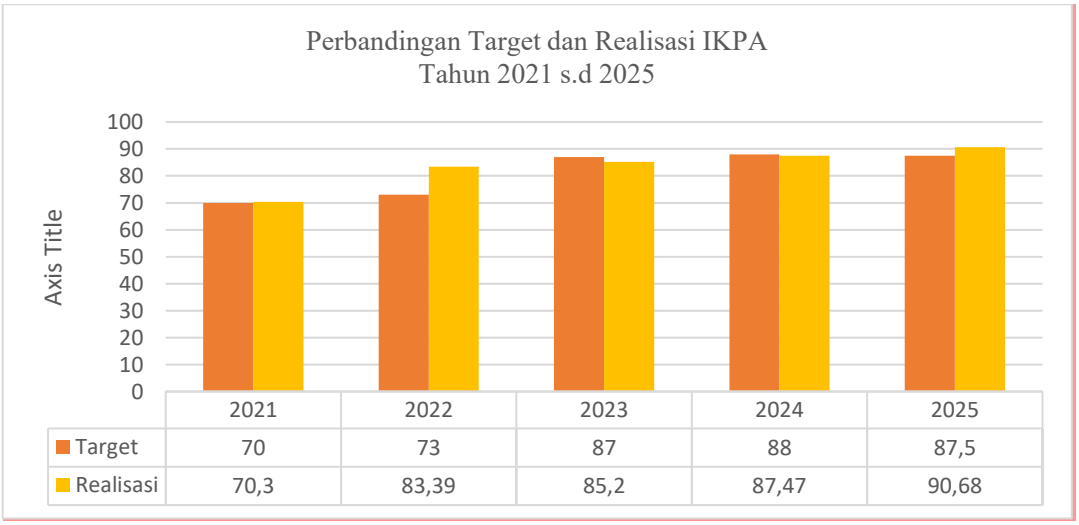

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	70	73	87	88	87,5
Realisasi	70,3	83,39	85,2	87,47	90,68

Grafik 5. Perbandingan Target dan Realisasi IKPA Tahun 2021 s.d 2025

2.3 Indeks Pengelolaan Aset Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan instrumen pengukuran kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja secara tahunan. IPA digunakan untuk menilai kualitas tata kelola aset negara yang dikelola oleh

Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna Barang, guna mendukung terwujudnya pengelolaan BMN yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

IPA merupakan salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi, khususnya pada area pengelolaan BMN. Melalui IPA, kualitas pengelolaan aset diukur secara sistematis untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.

Indikator Kinerja Pengelolaan BMN atau IPA adalah parameter pengukuran kinerja di bidang pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang. Pengukuran dilakukan secara tahunan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan kualitas pengelolaan aset negara secara menyeluruh.

Formula IPA Tahun 2025 disusun untuk mengukur kinerja pengelolaan BMN secara komprehensif melalui beberapa parameter utama, meliputi:

a. Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif: Tindak lanjut temuan pada LHP BPKatas LKPP dan LKKL terkait BMN (bobot 25%)

    - Parameter ini mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait BMN yang tercantum dalam LHP atas LKPP dan LKKL. Satuan kerja berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tepat waktu dan tuntas sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan aset negara.

b. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan: Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Penyampaian LBKP (12,5%) dan Laporan Wasdal BMN (12,5%)

    - Parameter kepatuhan mengukur sejauh mana satuan kerja melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan tersebut tercermin dari ketepatan waktu dan kelengkapan penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dan laporan Wasdal BMN kepada Pengguna Barang.

c. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif: Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtangan, dan Penghapusan BMN (15%) serta Tindak Lanjut BMN Rusak Berat (10%)

   - Parameter ini mengukur efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengguna Barang, yang mencakup tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan BMN, serta penanganan BMN rusak berat hingga diterbitkannya surat keputusan penghapusan sesuai peraturan yang berlaku.

d. BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya (25%)

   - Parameter ini mengukur tingkat penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh BMN telah memiliki status penggunaan yang sah dan tercatat sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan indikator kinerja yang baru diterapkan di lingkungan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Pada tahun pertama implementasinya, capaian indikator IPA belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Target indeks yang ditetapkan sebesar 3, sedangkan hasil akhir penilaian menunjukkan capaian sebesar 2,97.

Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh adanya aset yang belum dapat diproses secara optimal dalam administrasi pengelolaan BMN. Aset dimaksud merupakan aset milik Asisten Deputi Sasaran dan Program (Asdep Saspro) yang pencairan anggarannya baru terealisasi pada akhir tahun anggaran, yaitu pada bulan Desember 2025. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan proses serah terima aset serta penetapan status penggunaan (PSP), sehingga pada indikator Administrasi BMN yang Andal (indikator keempat), hanya sebagian kecil aset yang dapat diproses pada tahun berjalan.

Gambar 2. Kertas Kerja Perhitungan IPA Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

KERTAS KERJA PERHITUNGAN
INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA) SATUAN KERJA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TAHUN 2025

No	Parameter		Data		Nilai Parameter*	Penyesuaian Kelompok	Bobot	Nilai Parameter/Indeks Akhir setelah Penyesuaian*	Indeks
1	2		3	4	5=3/4	6	7	8=5x6	9=7x8
1,	Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif								
	1,1	Tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP dan LKKL terkait BMN	Ditindaklanjuti	Jumlah Temuan 2019 s.d Tahun 2024			Bobot	indeks sebelum bobot	1,00
			11	11			25%	4	
2,	Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan								
	2,1	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN					Bobot		
							25%	3	0,72
	2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian LBP	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian		Lengkap/Tidak Lengkap	Bobot	indeks sebelum bobot	2,00
			-	20 Januari 2025		Tidak Lengkap	50%	4	
			16 Juli 2025	14 Juli 2025		Tidak Lengkap			
	2.1.2	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan Wasdal BMN	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian		Lengkap/Tidak Lengkap	Bobot	indeks sebelum bobot	0,88
			9 Juli 2025	16 Januari 2025		Lengkap	50%	2	
			-	7 Juli 2025		-			
3,	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
	3,1	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	Persetujuan Ditindaklanjuti	Jumlah Persetujuan			Bobot	indeks sebelum bobot	0,60
			1	1			15%	4	
	3,2	Tindak lanjut BMN rusak berat	Saldo Periode Awal	Saldo Periode Akhir			Bobot	indeks sebelum bobot	0,40
			-	-			10%	4	
4,	Administrasi BMN yang Andal								
	4,1	Penggunaan BMN sesuai ketentuan					Bobot		0,25
							25%		
	4.1.1	BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan	BMN PSP tahun 2025	Total BMN tahun 2025			Bobot	indeks sebelum bobot	0,25
			104	2988			25%	1	
*menyesuaikan parameter									
								Nilai IPA	2,97

Untuk meningkatkan capaian nilai IPA pada periode berikutnya, Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga akan melakukan beberapa upaya perbaikan, antara lain:

a. Percepatan proses serah terima dan penetapan status penggunaan (PSP) aset sejak awal tahun anggaran, khususnya terhadap aset hasil pengadaan pada unit kerja teknis.

b. Penguatan koordinasi dengan Asisten Deputi dan unit pengelola BMN, guna memastikan kelengkapan dokumen administrasi aset dapat dipenuhi tepat waktu.

c. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIMAN dan SAKTI, khususnya dalam pencatatan, pemutakhiran data, dan monitoring status pengelolaan BMN secara berkala.

d. Peningkatan perencanaan pengadaan dan pengelolaan aset, agar proses administrasi BMN tidak terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran.

Melalui upaya tersebut, diharapkan pengelolaan aset pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dapat semakin tertib, akuntabel, dan memenuhi

standar administrasi BMN yang andal, sehingga capaian nilai IPA pada tahun berikutnya dapat memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

2.4 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator kinerja pengelolaan anggaran yang digunakan ntuk menilai keterpaduan antara kualitas perencanaan anggaran dan kualitas pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan pada Kementerian/Lembaga.

Data realisasi anggaran dan realisasi output yang digunakan dalam penghitungan Nilai Kinerja Anggaran bersumber dari aplikasi SAKTI dan telah dilakukan validasi melalui Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kementerian Keuangan. Seluruh data yang digunakan merupakan data posisi terakhir pada periode pelaporan yang telah ditetapkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar utama dalam proses penghitungan Nilai Kinerja Anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) disusun berdasarkan hasil integrasi antara Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dengan bobot masing-masing sebesar 50%. Integrasi ini bertujuan untuk menilai keseimbangan antara kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas perencanaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan.



Nilai Kinerja Anggaran dihitung berdasarkan tiga aspek utama, yaitu:

1. Capaian Output dengan bobot sebesar 75%, yang mencerminkan kesesuaian antara target output yang direncanakan dengan realisasi output yang dicapai;
2. Penggunaan Standar Biaya Kegiatan (SBK) dengan bobot sebesar 10%, yang mencakup penggunaan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) dan Standar

Biaya Keluaran Umum (SBKU) pada Rincian Output (RO) dalam RKA-K/L; dan

3. Efisiensi Standar Biaya Kegiatan dengan bobot sebesar 15%, yang dihitung berdasarkan selisih antara Indeks SBK dengan Indeks Realisasi Anggaran per Output.

Berdasarkan hasil penghitungan sampai dengan bulan Desember 2025, Satuan Kerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 85,50. Dengan bobot sebesar 50%, kontribusi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terhadap Nilai Kinerja Anggaran adalah sebesar 42,75%.

Capaian tersebut tidak serta merta hal itu merupakan upaya tim pengelola anggaran dalam meningkatkan ketidaktercapainya target tahun sebelumnya dikarenakan pada pertengahan tahun 2024 terjadi perubahan penilaian NKA dari tahun sebelumnya, komponen penilaian termasuk efisensi SBK dimana Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga belum memiliki SBK. Tidak adanya SBK bagi Satker berdampak signifikan pada penilaian NKA, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mendapatkan skor 75/100 pada aspek ini

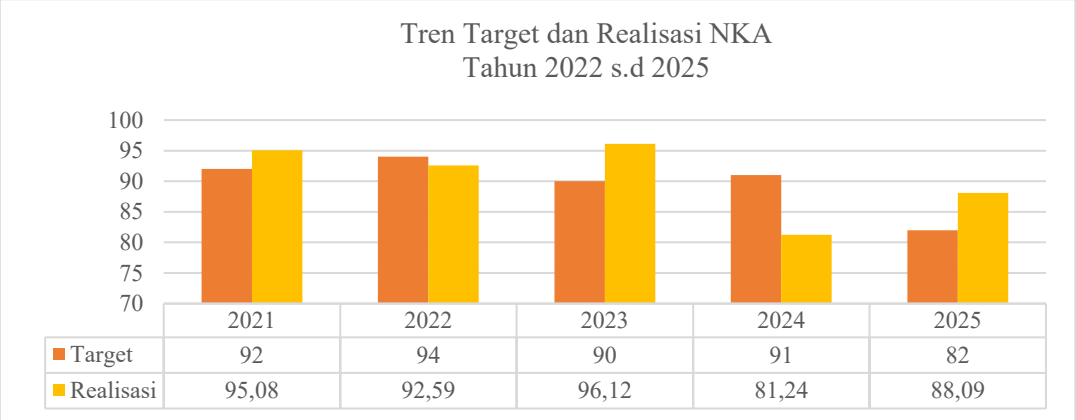

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	92	94	90	91	82
Realisasi	95,08	92,59	96,12	81,24	88,09

Grafik 6. Tren Target dan Realisasi NKA Tahun 2022 s.d 2025

2.5 Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Layanan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner secara elektronik pada tautan https://skm.kemenpora.go.id yang disebarkan kepada

pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yaitu :

1. Persyaratan: Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 3 ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

Berikut adalah penilaian IKM Deputi Bidang Peningkatan Prestasi:

Tabel 6. Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Per Unit Kerja

No.	Unit	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM Per Unit Layanan
1.	Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi olahraga	439	95,27	95,16	95,22	99,2	95,27	95,9	96,87	99,37	94,25	96,28
2.	Asisten Deputi Olahragawan Elit	480	88,65	88,65	87,92	92,71	88,28	89,64	90,21	96,04	89,06	90,13
3.	Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	769	90,08	90,08	88,43	94,28	89,47	90,64	91,22	96,65	90,38	91,25
4.	Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi	128	89,65	89,45	89,26	100	93,55	92,19	93,36	100	100	94,16
5.	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	1308	88,61	87,19	86,2	95,13	87,94	90,23	90,48	96,96	90,23	90,33
Rerata IKM Per Unsur			89,96	89,34	88,4	95,32	89,63	91,12	91,64	97,21	91,05	91,52
IKM Satuan Kerja Layanan			91,52									
Mutu Satuan Kerja Layanan			Sangat Baik									

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek waktu penyelesaian dan sistem, mekanisme dan prosedur merupakan 2 (dua) isu yang paling sering kecil. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Waktu penyelesaian mendapatkan nilai terendah yaitu 88,4. Selanjutnya sistem, mekanisme dan prosedur yang mendapatkan nilai 89,34 adalah nilai terendah kedua. Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama kami adalah melakukan sosialsasi mengenai standar pelayanan dan serta mempersiapkan bagan alur prosedur pelayanan lebih mudah dipahami pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah Kami susun untuk perbaikan layanan ke depan.

No	Unit	Unsur	Temuan	Rencana Tindak Lanjut
1	**Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga**	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pengguna tidak tersosialisasikan terkait prosedur pelayanan	Menyelenggarakan FKP untuk mereviu SP secara *hybrid (online* dan *offline*) dengan menghadirkan beberapa unsur seperti : media massa, perwakilan pengurus cabang olahraga, perwakilan dinas pemuda olahraga di daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) dan akademisi.
2	**Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga**	Waktu penyelesaian	Pengguna tidak tersosialisasikan waktu penyelesaian layanan	Membuat diagram alur dan waktu standar pelayanan

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dapat dilihat melalui grafik berikut:

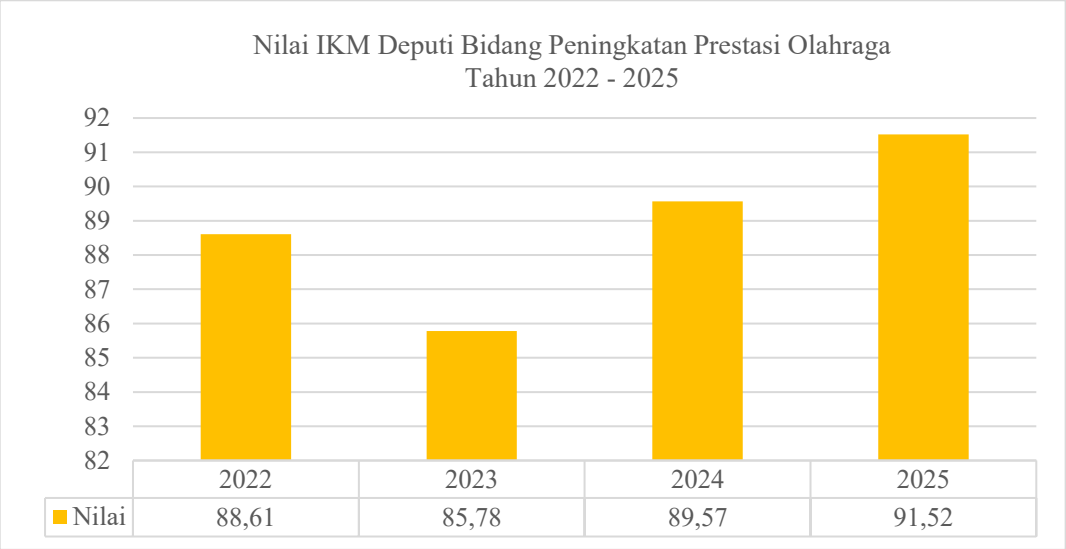

Grafik 7. Nilai IKM Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2022 – 2025

Pelaksanaan pelayanan publik di Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 91,52. Meskipun demikian, nilai SKM Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menunjukkan konsistensi peningkatanan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 sebesar 85,47 hingga menjadi 91,52 pada tahun 2025.

2.6 Nilai Rata-Rata Hasil Pengawasan Kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Nilai kearsipan diperoleh dari hasil audit yang dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Terdapat indikator sebagai dasar perhitungan penilaian kearsipan yaitu:

a. Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi: Penciptaan arsip, Penggunaan arsip, Penyusutan arsip
b. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan dan Prasarana dan Sarana Kearsipan.

Dari indikator tersebut diperoleh nilai hasil kearsipan dari setiap unit eselon 2 yang selanjutnya dapat dijumlahkan dan dibagi total seluruh unit eselon 2 untuk mendapatkan perhitungan Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan kedeputian.

Pada Tahun 2025, realisasi nilai pengelolaan kearsipan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Target nilai kearsipan sebesar 73, sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar 56,85. Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi hasil penilaian secara keseluruhan.

Tabel 7. Nilai Kearsipan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025

No.	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SEBELUM VERIFIKASI	NILAI HASIL VERIFIKASI
1	Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	83.43	86.71
2	Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	62.85	62.85
3	Asisten Deputi Olahragawan Elit	41.6	50.1
4	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	18.5	27.75
Total		206.38	227.41
Nilai Arsip Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		51.60	**56.85**

Nilai kearsipan Deputi merupakan hasil akumulasi kontribusi dari tiga Asisten Deputi dan Sekretariat Deputi. Dalam hal ini, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi (Tenor Pres) memberikan kontribusi dengan nilai yang relatif rendah, sehingga secara signifikan memengaruhi capaian nilai kearsipan pada tingkat Deputi (Eselon I). Selain itu, Asisten Deputi SPOP yang tidak termasuk ke dalam lokus penilaian pengawasan kearsipan internal pada tahun berjalan, sehingga tidak memberikan kontribusi nilai terhadap capaian kinerja kearsipan Deputi secara optimal. Selain itu. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan capaian nilai kearsipan secara keseluruhan, meskipun sebagian unit kerja lainnya telah menunjukkan upaya pemenuhan indikator kearsipan sesuai ketentuan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk melakukan perbaikan dan penguatan pengelolaan kearsipan secara lebih terintegrasi pada periode berikutnya.

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi rata-rata hasil pengawasan arsip Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selama periode Tahun 2023–2025, terlihat bahwa capaian kinerja kearsipan belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2023, target nilai pengawasan arsip sebesar 72, sementara realisasi yang dicapai sebesar 60. Pada Tahun 2024,

meskipun target meningkat menjadi 73, realisasi hanya mencapai 61,7, menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya namun belum signifikan.

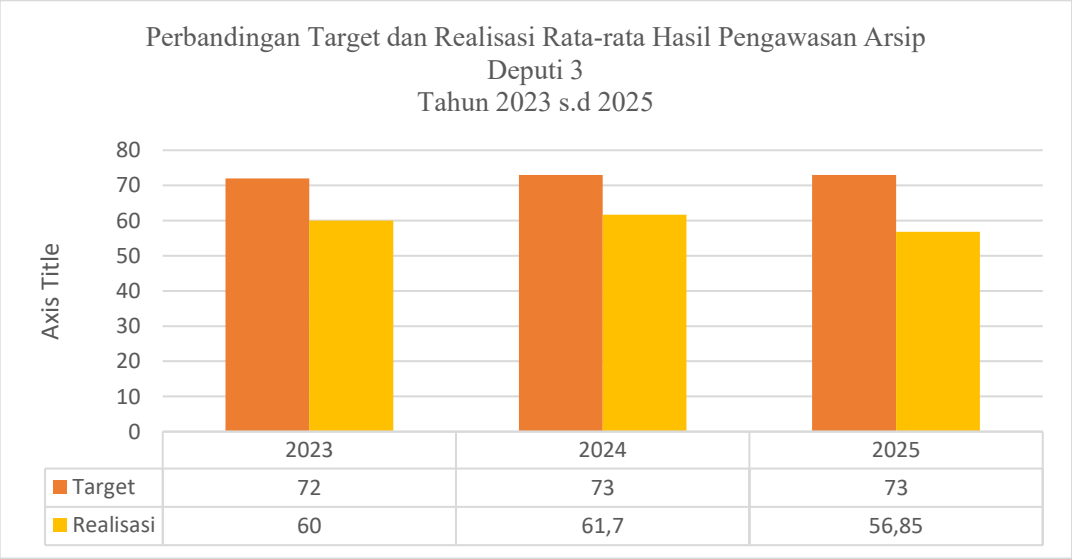

Grafik 8. Perbandingan Target dan Realisasi Rata-rata Hasil Pengawasan Arsip Deputi 3 Tahun 2023 s.d 2025

Pada Tahun 2025, target pengawasan arsip tetap ditetapkan sebesar 73, namun realisasi justru mengalami penurunan menjadi 56,85. Penurunan capaian pada tahun 2025 menunjukkan adanya tantangan yang lebih kompleks dalam pengelolaan kearsipan, khususnya terkait dengan cakupan penilaian dan kontribusi unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Secara umum, tren realisasi menunjukkan fluktuasi dan cenderung berada di bawah target, yang mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan dan pengawasan arsip belum berjalan secara optimal dan merata di seluruh unit kerja. Faktor utama yang memengaruhi capaian tersebut antara lain adanya unit kerja yang memberikan kontribusi nilai rendah sehingga berdampak langsung terhadap capaian nilai agregat pada tingkat Deputi (Eselon I), serta ditambah dengan tidak masuknya salah satu Asisten Deputi ke dalam lokus penilaian pengawasan kearsipan internal.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting bagi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk memperkuat koordinasi antarunit kerja, meningkatkan kepatuhan terhadap standar kearsipan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan arsip agar capaian kinerja kearsipan pada tahun-tahun berikutnya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting bagi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk memperkuat koordinasi antarunit kerja, meningkatkan kepatuhan terhadap standar kearsipan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan arsip agar capaian kinerja kearsipan pada tahun-tahun berikutnya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan capaian nilai pengawasan arsip pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada tahun berikutnya, akan dilakukan sejumlah upaya perbaikan yang bersifat strategis dan berkelanjutan, yaitu:

a. Meningkatkan komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga agar pengelolaan kearsipan dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
b. Memperkuat koordinasi dan pembinaan kearsipan kepada seluruh Asisten Deputi dan Sekretariat Deputi, khususnya unit kerja yang masih memberikan kontribusi nilai rendah, melalui pendampingan teknis dan monitoring secara berkala.
c. Mendorong perluasan lokus penilaian pengawasan kearsipan internal agar seluruh Asisten Deputi dapat berkontribusi secara optimal terhadap capaian nilai kearsipan di tingkat Deputi (Eselon I).
d. Melakukan penataan dan penertiban arsip secara berkelanjutan, baik arsip aktif maupun arsip inaktif, sesuai dengan standar pengelolaan arsip yang berlaku.
e. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola arsip melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta peningkatan pemanfaatan sistem kearsipan berbasis elektronik.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan arsip di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dapat semakin tertib, akuntabel, dan mendukung peningkatan capaian nilai pengawasan arsip pada periode berikutnya.

2.7 Persentase Pegawai ASN yang diberikan Pengembangan Kompetensi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan karakteristik dan kemampuan kerja ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta

sikap sesuai dengan tugas dan/atau fungsi jabatan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme ASN serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pada Tahun 2023, persentase pengembangan kompetensi ASN tercatat sebesar 38%, yaitu sebanyak 99 orang dari total 260 ASN yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Selanjutnya, pada Tahun 2024 persentase pengembangan kompetensi ASN mengalami penurunan menjadi 35,02%, dengan jumlah ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sebanyak 194 orang dari total 554 ASN. Penurunan persentase tersebut terjadi seiring dengan adanya penambahan jumlah ASN yang cukup signifikan di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Penurunan persentase capaian pada Tahun 2024 tersebut disebabkan oleh adanya penambahan jumlah ASN yang cukup besar di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Kondisi ini menyebabkan peningkatan jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi belum sebanding dengan pertumbuhan total ASN. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi tetap berjalan dan berkembang secara kuantitatif, namun masih diperlukan strategi pengembangan kompetensi yang lebih terencana dan merata agar persentase capaian dapat kembali meningkat pada periode selanjutnya.

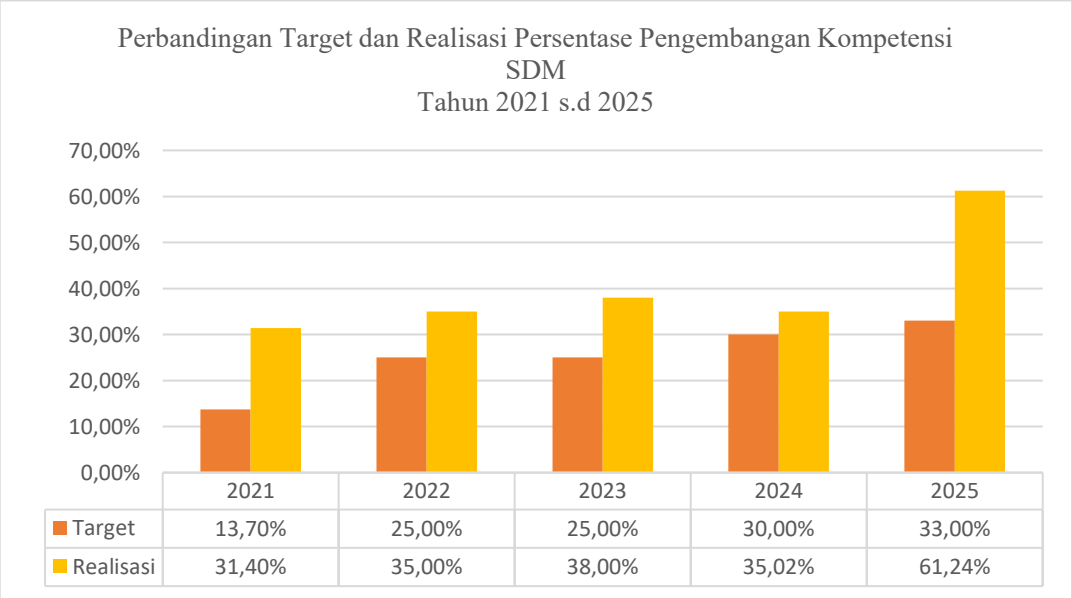

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	13,70%	25,00%	25,00%	30,00%	33,00%
Realisasi	31,40%	35,00%	38,00%	35,02%	61,24%

Grafik 9. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Tahun 2021 s.d 2025

Pada Tahun 2025, persentase pengembangan kompetensi ASN menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan menjadi **61,24%** dengan jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak **365 orang dari total 596 ASN**. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan upaya perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi yang lebih terarah, serta meningkatnya komitmen organisasi dalam mendorong pemerataan akses pengembangan kompetensi bagi ASN.

Tren peningkatan capaian pada Tahun 2025 tersebut menunjukkan adanya perbaikan strategi pengembangan kompetensi ASN yang semakin efektif dan responsif terhadap dinamika jumlah pegawai, sehingga diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung peningkatan kinerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga secara berkelanjutan.



Grafik 10. Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi SDM Tahun 2025

Kendala dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN antara lain masih terjadinya penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya penyesuaian akibat penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, serta keterkaitan dengan proses pengelolaan dan penyesuaian anggaran yang memerlukan waktu adaptasi. Hal ini berdampak pada

keterbatasan ruang pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi secara lebih merata sepanjang tahun.

Namun demikian, pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN tetap mendapatkan antusiasme dan minat yang tinggi dari para pegawai. Kegiatan pengembangan kompetensi ini bahkan menjadi salah satu program yang selalu dinantikan setiap tahunnya, karena dinilai memberikan manfaat nyata dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta kapasitas kerja pegawai. Kondisi ini menjadi modal penting bagi organisasi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN pada periode berikutnya.

N. Capaian Kinerja Lainnya

1. **Lembaga yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Unggulan**

Indikator Lembaga yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Unggulan merupakan ukuran penting dalam menilai sejauh mana Kemenpora berperan sebagai enabler ekosistem kompetisi nasional. Dalam kerangka Renstra Kemenpora 2025–2029, penguatan kompetisi nasional menjadi fondasi bagi pembinaan atlet elit karena menjadi titik temu antara pembibitan daerah, pembinaan klub, dan seleksi menuju pelatnas.

Target	Realisasi	Persentase
15 Lembaga	15 Lembaga	100%

Pada tahun pelaksanaan, indikator ini ditetapkan dengan target 15 lembaga, dan realisasinya juga mencapai 15 lembaga, atau 100% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitasi pemerintah terhadap penyelenggara kompetisi nasional telah terlaksana sesuai dengan perencanaan, tanpa deviasi kuantitatif. Berikut adalah daftar lembaga yang terfasilitasi oleh Asisten Deputi Bidang Olahragawan Elit:

Kejuaraan Nasional Olahraga Prestasi		
NO	**LEMBAGA**	**NAMA KEGIATAN**
1	FPTI	Kejuaraan Nasional Panjat Tebing Umum XIX
2	Akuatik Indonesia	A Stream Perlombaan Renang Perairan Terbuka
3	PORLASI	KEJURNAS REGATTA 2025
4	IPSI	Kejurnas Pencak Silat Tingkat Remaja
5	Yayasan Asy-Syura 17	Pencak Silat Championship 2025
6	BHINEKA	BOLAVOLI BHINEKA CUP 2
7	Perkumpulan Bola Voli Ganessa Spadist	Turnamen Bola Voli Gala Desa Se-Kabupaten Ponorogo
8	Yayasan Gurupala Kota Sukabumi	Kejuaraan Daerah Bola Voli Putra Se-Jawa Barat Piala Kemenpora RI 2025
9	Lembaga Pemuda Kreatif	Turnamen Sepak Bola Pemuda Jember
10	Forum Keolahragaan Mahasiswa Sukabumi	FOKSI Cup Champion Futsal
11	Yayasan Olahraga Bina Sembilan	Sukabumi Wall Climbing Competion 2025
12	Vasaka Taekwondo Club Blora	Kejurnas Taekwondo 2025
13	Pergatsi	Kejuaraan Nasional Gateball 2025
14	IMI Sumut	Kejurnas Rally Sumut Putaran 2
15	PB Ferkushi	2nd KUSEA Kurash

Pada **2021**, dengan target 10 lembaga dan realisasi 17 lembaga (170%), fokus masih pada pembukaan akses kompetisi nasional dan potensi daerah, untuk memperluas basis atlet junior dan potensial elit.

Pada **2022**, target naik menjadi 14 lembaga dengan realisasi 16 lembaga (114%). Perluasan ini selaras dengan penguatan cabang unggulan berbasis DBON, yang mulai mengarahkan dukungan pemerintah pada cabang prioritas.

Pada **2023**, target 15 lembaga dan realisasi 18 lembaga (120%) menunjukkan bahwa sistem fasilitasi kejurnas semakin stabil, dengan fokus pada *single event* olahraga prestasi yang lebih terstandar.

Pada **2024**, target dinaikkan signifikan menjadi 20 lembaga dan seluruhnya terealisasi (100).Tahun ini mencerminkan fase ekspansi maksimal, dengan dukungan pada *single event* dan *multievent* nasional untuk memperluas kompetisi dan meningkatkan jam tanding atlet menjelang siklus *multievent* internasional.

Pada **2025**, target disesuaikan menjadi 15 lembaga dengan realisasi 15 lembaga (100%). Penurunan target ini bukan berarti pelemahan, melainkan penajaman fokus pada kualitas dan relevansi strategis.. Fasilitasi diarahkan pada lembaga dan kejuaraan yang benar-benar mendukung cabang olahraga unggulan Olimpiade dan Paralimpiade, serta terhubung langsung dengan sistem pelatnas dan talent pool nasional.

2. **Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Prasarana Olahraga Prestsai Berbasis Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah Difabel yang Dibangun,** Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Olahraga Prestasi adalah program kerja Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi dalam menyediakan, memperbaiki, atau meningkatkan kualitas infrastruktur fisik olahraga guna memastikan prasarana tersebut layak fungsi, tepat guna, dan memenuhi standar teknis untuk mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi atlet.

Target	Realisasi	Persentase
4 Lembaga	5 Lembaga	125%

Indikator ini dicapai melalui renovasi asrama SPOBNAS di provinsi Bengkuli, Lampung, NTT dan pembangunan lapangan serbaguna di Kabupaten Blora dan Kota Bandung.



3. **Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade**

Pada tahun 2025, pelaksanaan indikator Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade menunjukkan capaian yang sangat baik. Target yang ditetapkan sebanyak 145 lembaga, sementara realisasi mencapai 201 lembaga, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 120 persentabe dari target yang telah ditetapkan.

Target	Realisasi	Persentase
145 Lembaga	201 Lembaga	120%

Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan sarana olahraga prestasi yang berkualitas dan sesuai standar internasional sebagai prasyarat utama dalam pembinaan atlet berprestasi. Fasilitasi sarana olahraga prestasi dilaksanakan untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis, antara lain SPB0NAS, IOCO, klub/sentra olahraga, pemusatan latihan nasional (Pelatnas), penyelenggaraan kejuaraan dunia, serta penguatan laboratorium sport science.



Berdasarkan sebaran lembaga penerima fasilitasi, dukungan sarana olahraga diberikan kepada berbagai jenis lembaga, meliputi organisasi masyarakat, perkumpulan klub olahraga, pemerintah daerah, induk organisasi cabang olahraga, perguruan tinggi, serta SPB0NAS yang tersebar di 32 provinsi. Sebaran ini menunjukkan pendekatan kolaboratif dan inklusif dalam pembangunan ekosistem olahraga prestasi nasional.

Secara keseluruhan, penyediaan sarana olahraga prestasi ini merupakan upaya strategis pemerintah dalam menyesuaikan kebutuhan pembinaan atlet dengan standar teknis federasi nasional dan internasional. Dengan tersedianya sarana yang memadai dan berstandar, diharapkan dapat meningkatkan performa atlet secara berkelanjutan serta mendukung pencapaian target prestasi olahraga nasional di tingkat regional maupun internasional.

Kendala pelaksanaan:

- Adanya variasi kondisi dan kebutuhan sarana olahraga pada masing-masing lembaga penerima.
- Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan agenda pembinaan dan aktivitas lembaga.
- Proses koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait yang memerlukan penyesuaian waktu.
- Penyesuaian teknis pelaksanaan agar sarana yang difasilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade Dan Paralimpiade Yang Bersertifikat Internasional

Indikator ini harapannya dapat fokus dalam meningkatnya Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Bersertifikat lnternasional. Unit kerja Asdep Tenor Prestasi bertanggung jawab melaksanakan kegitan kepelatihan Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Bersertifikat lnternasional dimana ditujukan kepada Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga dengan Sertifikasi Nasional. Adapun dalam Peningkatan Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade/paralimpiade bersertifikasi Internasional, realisasi capaian kinerjanya didapat melalui Kegiatan Pelatihan Wasit Internasional Cabang Olahraga Anggar dan Dayung. Adapun wasit yang mengikuti kedua kegiatan pelatihan tersebut berjumlah 60 Orang.

Target	Realisasi	Persentase
30 Orang	60 Orang	200%

Pengelolaan sumber daya manusia ini memerlukan pendekatan khusus untuk menyelaraskan tugas dan tanggung jawab para Tenaga Keolahragaan khususnya Cabang Olahraga yang akan mengikuti Olimpiade atau Paralimpiade dengan komitmen Peningkatan SDM olahraga dan Peningkatan Prestasi secara langsung. Tantangan utamanya adalah mengintegrasikan kedua peran tersebut secara sinergis sembari menjamin pengembangan prestasi jangka panjang.

O. Realisasi Anggaran

Tabel 8. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2025

No	Unit Kerja	Anggaran		Capaian
		Pagu (Rp)	Realisasi	
1	Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	Rp198.623.340.000	Rp196.158.328.042	98,76%
2	Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	Rp122.436.058.000	Rp122.282.238.300	99,87%

3	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	Rp93.766.777.000	Rp92.415.129.454	98,56%
4	Pembinaan Olahragawan Elit	Rp1.096.359.002.000	Rp1.094.783.386.380	99,86%
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Rp9.200.132.000	Rp8.966.691.135	97,46%
Total		**Rp1.520.385.309.000**	**Rp1.514.605.773.316**	**99,62%**

P. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 133 Tahun 2024 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai kinerja yang optimal. Efisiensi sumber daya dalam konteks ini berarti memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Hal ini mencakup penggunaan waktu, tenaga, dana, dan aset lainnya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, efisiensi sumber daya menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

$$efisiensi = \frac{input}{output} = \frac{\%\text{Realisasi Anggaran}}{\%\text{Capaian Kinerja}}$$

$$= 99{,}62\% / 107\%$$

efisiensi = 93%

2025

BAB IV

Penutup



A. Kesimpulan dan Saran

Secara keseluruhan, kinerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi menunjukkan performa yang sangat impresif. Dengan skor kinerja total mencapai 107%, organisasi tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi berhasil melampaui target indikator utama prestasi yang telah ditetapkan. Capaian ini didukung oleh kedisiplinan fiskal yang luar biasa, tercermin dari realisasi anggaran yang menyentuh angka 99,62%. Mayoritas satuan kerja menunjukkan penyerapan yang hampir sempurna (98–100%), menandakan manajemen operasional yang matang dan terukur.

Namun, di balik kegemilangan angka tersebut, terdapat "celah kecil" yang memerlukan perhatian. Meskipun indikator teknis melesat, sisi administratif dan pengawasan masih tertinggal—terutama pada indeks pengawasan kearsipan yang baru mencapai 78%. Selain itu, beberapa pos dukungan manajemen menunjukkan realisasi sedikit di bawah pagu, yang jika dibiarkan, berpotensi menghambat kelancaran kegiatan prioritas di masa mendatang.

Untuk menutup celah tersebut dan mempertahankan momentum keberhasilan ini, langkah-langkah strategis berikut menjadi prioritas utama:

- **Penguatan pengawasan dan administrasi**
  Melakukan audit cepat terhadap proses kearsipan dan sistem pelaporan, menyusun atau menyempurnakan SOP tata naskah dan arsip, serta menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai terkait guna meningkatkan capaian indikator pengawasan.
- **Tindak lanjut indikator di bawah target**
  Menyusun rencana aksi korektif jangka 3–6 bulan untuk setiap indikator yang belum tercapai, lengkap dengan penanggung jawab, tahapan pelaksanaan, dan output terukur, serta melakukan pemantauan progres melalui evaluasi bulanan.
- **Optimalisasi alokasi anggaran**
  Meninjau kembali pos dengan realisasi di bawah 100% untuk memastikan tidak ada kegiatan prioritas yang tertunda, serta mempertimbangkan realokasi sisa anggaran yang masih memungkinkan guna mendukung kegiatan strategis.
- **Pemeliharaan praktik baik kinerja program**
- Mendokumentasikan mekanisme dan strategi pelaksanaan yang terbukti efektif, seperti pola koordinasi, sistem pengendalian internal, dan format pelaporan, untuk dijadikan standar pelaksanaan pada periode berikutnya.

- **Peninjauan indikator kinerja**

  Melakukan evaluasi terhadap indikator yang kurang realistis atau kurang merepresentasikan kondisi lapangan agar pengukuran kinerja lebih relevan, objektif, dan mencerminkan capaian riil.

- **Dokumentasi pembelajaran dan keberlanjutan program**

  Menghimpun pembelajaran dari program yang melampaui maupun yang belum mencapai target sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya, terutama dalam penentuan alokasi anggaran, penguatan kapasitas SDM, dan penyempurnaan prosedur kerja.